

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerukunan beragama ditengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dibawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. Sayangnya wacana mengenai Pancasila seolah lenyap seiring dengan berlangsungnya reformasi.

Berbagai macam kendala yang ada yang sering kita hadapi dalam mensukseskan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dari luar maupun dalam negeri kita sendiri. Namun dengan adanya kendala tersebut warga Indonesia selalu optimis, bahwa dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka banyak pula solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Dari berbagai pihak telah sepakat untuk mencapai tujuan kerukunan antar umat beragama di Indonesia seperti masyarakat dari berbagai golongan, pemerintah, dan organisasi-organisasi agama yang banyak berperan aktif dalam masyarakat Keharmonisan dalam komunikasi antar sesama penganut agama adalah tujuan dari kerukunan beragama, agar terciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman, kekerasan hingga konflik agama.

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di Tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat Dinamis, Humanis dan Demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat dikalangan bawah sehingga, kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan atau dinikmati oleh kalangan-kalangan atas atau orang kaya saja. Karena, agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Agama hanya salah satu faktor dari kehidupan manusia. Mungkin faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa untuk mengerti lebih dalam tentang agama perlu segi-segi lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Yang paling mungkin adalah mendapatkan pengertian yang mendasar dari agama-agama. Jadi, keterbukaan satu agama terhadap agama lain sangat penting. Kalau kita masih mempunyai pandangan yang fanatik, bahwa hanya agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghalang yang paling berat dalam usaha memberikan sesuatu pandangan yang optimis. Kita sering terperangkap dengan iebakan "toleransi antar umat beragama". yang diartikan dengan mencampuradukkan ritual keagamaan.

Makna toleransi yang sebenarnya bukanlah mencampur adukkan keimanan dan ritual Islam dengan agama non Islam, tapi menghargai eksistensi agama orang lain. Kita tidak dilarang melakukan kerjasama dengan non muslim dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal dunia, misalnya hubungan bisnis ataupun studi. Bahkan ada ayat yang memerintahkan agar kita berlaku adil kepada siapa pun, termasuk kepada non muslim. Namun ketika kontak-kontak antaragama sering kali terjadi sejak tahun 1950-an, maka muncul paradigma dan arah

baru dalam pemikiran keagamaan. Orang tidak lagi bersikap negatif dan apriori terhadap agama lain. Bahkan mulai muncul pengakuan positif atas kebenaran agama lain yang pada gilirannya mendorong terjadinya saling pengertian. Di masa lampau, kita berusaha menutup diri dari tradisi agama lain dan menganggap agama selain agama kita sebagai lawan yang sesat serta penuh kecurigaan terhadap berbagai aktivitas agama lain, maka sekarang kita lebih mengedepankan sikap keterbukaan dan saling menghargai satu sama lain.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, etnis, dan suku bangsa, memiliki cara pemahaman yang berbeda-beda dalam menjalankan keyakinan beragama yang tidak dapat dipungkiri. Hal itu justru menjadi salah satu kekayaan yang tidak adaandingannya. Tentunya tidak dapat dipungkiri dengan adanya perbedaan etnis dan agama dapat pula menyebabkan perbedaan dari prinsip nasionalisme.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pembukaan pesta paduan suara Gerejawi(Pesparawi) Nasional VII tahun 2006 mengatakan bahwa "Perbedaan yang timbul pada dasarnya dapat didialogkan, maka pemerintah akan terus mendorong bentuk diskusi lintas agama untuk mendorong saling pengertian dan memahami keyakinannya masing-masing".

Presiden mengatakan, masing-masing pemeluk agama harus dapat menghormati dan menghargai satu sama lain agar dapat menjalankan agamanya dengan tentram, lahir maupun batin. "Selain itu dengan kerukunan maka konflik dan kekerasan yang dapat memecah belah bangsa dapat dicegah".

Sejak awal sejarah Indonesia, keterlibatan negara dalam urusan-urusan agama tak terelakkan. Sulit menilai apakah ini merupakan sesuatu yang positif atau negatif. Keterlibatan itu lebih merupakan konsekuensi alamiah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa awal sejarah pembentukan Indonesia sebagai negara merdeka. Keinginan sebagian kelompok Muslim untuk mendasarkan pembentukan negara Indonesia secara lebih eksplisit pada Islam tak mendapatkan cukup dukungan. Salah satu jalan yang ditempuh untuk mengakomodasi aspirasi itu adalah pembentukan Departemen Agama hanya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka yang akan menaruh perhatian khusus pada urusan-urusan sosial Muslim. Dengan itu, keterlibatan agama yang cukup jauh pada kehidupan beragama rakyatnya bermula.

Persoalan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana negara menampung aspirasi keberagaman rakyatnya dan, karena adanya kemajemukan, bagaimana menciptakan rambu-rambu lalu-lintas di antara agama-agama. Setiap kebebasan selalu diikuti dengan hukum. "Negara menjamin kebebasan beragama" yang ada dalam UUD 1945 pun berarti juga membatasi kebebasan itu di wilayah-wilayah persentuhan satu komunitas agama dengan komunitas-komunitas lainnya.

Beberapa persoalan besar kita berawal dari sini. Salah satunya menyangkut definisi "agama" untuk kepentingan administratif kenegaraan dan legalitasnya. Definisi-definisi agama yang diajukan biasanya memiliki bias Islam dan Kristen (sebagai agama Ibrahim terbesarnya di Indonesia) yang sangat terlihat misalnya persyaratan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, adanya tradisi yang bermula dari figur seorang Nabi, dan kepemilikan kitab suci.

Pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa sebenarnya persatuan dan kerukunan adalah kata kunci dari keberhasilan dalam meraih kemerdekaan. Demikian pula hendaknya dalam mengisi kemerdekaan, persatuan dan kerukunan (termasuk kerukunan antarumat beragama) dari segenap komponen bangsa semestinya menjadi modal penting bagi kita. Konsep persatuan dan kerukunan tersebut semestinya kita pegang teguh. Apalagi bila mengingat, dewasa ini taktik adu domba dan pecah-belah sering dilakukan pihak-pihak tertentu di tengah gencarnya ancaman disintegrasi nasional. Perbedaan agama, budaya, suku, bahasa dan adat dalam diri bangsa Indonesia sesungguhnya dapat menjadi potensi integrasi dan sekaligus potensi disintegrasi. Jika perbedaan itu dikelola baik, dengan berlaku adil dan menganggap perbedaan sebagai kekayaan khazanah bangsa, maka ia dapat menjadi potensi integrasi. Sebaliknya, manakala perbedaan itu tidak dikelola secara adil, maka ia akan menjadi potensi disintegrasi bangsa. Terjadinya konflik-konflik antarumat beragama selama ini, bisa jadi disebabkan oleh faktor ketidakadilan itu. Diantaranya tampak jelas dalam hal kesenjangan ekonomi antarpenganut agama. Hal itu juga tampak dalam perlakuan politik berdasarkan agama yang dianut, terutama di masa rezim Orde Baru, di mana demi memperoleh dukungan politik, rezim itu memberikan posisi-posisi strategis kepada elit-elit dari agama tertentu. Perlakuan kurang adil itu bisa memancing kecemburuan dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Apalagi antara umat beragama kurang intens mengadakan dialog agama, perlakuan tak adil demikian tambah membuka peluang terjadinya konflik antarumat beragama. Ini terjadi karena masalah agama adalah sangat sensitif bagi para pemeluknya. Sedikit saja ada gesekan, bisa membuat penganutnya terkena emosi. Dan karena alasan fanatisme, hal itu dapat membuat tindakan mereka sulit dikontrol. Dengan demikian, terjadinya konflik antarumat beragama lebih disebabkan oleh faktor

ketidakadilan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Bukan oleh faktor doktrinal. Agaknya, doktrin-doktrin setiap agama, termasuk Islam.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai kerukunan umat beragama di Indonesia ada beberapa sebab, antara lain; Rendahnya Sikap Toleransi, Kepentingan Politik dan Sikap Fanatisme.

Sebagai seorang yang beragama, hidup dan menjadi bangsa Indonesia seharusnya benar-benar bersyukur. Karena ditengah keberagaman agama yang ada Indonesia menerapkan toleransi beragama dengan sesama masyarakat Indonesia. Orang beragama tentu akan sangat mencintai agamanya. Mereka akan senang jika bisa menjalankan agamanya dengan bebas, tanpa ada hambatan sedikitpun. Selain itu, mereka juga akan bahagia jika para pemimpinnya memberikan ketauladanan dalam menjalankan agamanya.

Keadaan seperti itu di Indonesia telah dapat dilihat dan dirasakan. Tidak ada hambatan sedikitpun orang menjalankan agamanya. Jika ada aturan yang dianggap mengekang, misalnya dalam mendirikan tempat ibadah, sebenarnya hanyalah merupakan cara pemerintah untuk mengatur agar tidak terjadi benturan-benturan yang tidak perlu di antara umat beragama. Mendirikan tempat ibadah misalnya, harus mengikuti aturan tertentu. Pengaturan ini perlu, disamping agar lebih fungsional, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik-konflik antar umat beragama. Semua agama memang mengajarkan kedamaian. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, kedamaian itu berbalik menjadi sumber konflik manakala keberagaman itu sudah menjadi fenomena sosiologis. Fenomena sosiologis seperti itu diantisipasi oleh pemerintah, dengan dirumuskan, misalnya tatacara atau ketentuan mendirikan tempat ibadah itu, dan diberlakukan bagi semua agama.

Kehidupan keagamaan, sekalipun Indonesia bukan negara agama, diurus dan dalam batas-batas tertentu diberikan ketauladanan oleh pejabat pemerintah. Kita lihat saja misalnya, pada Bulan Ramadhan seperti sekarang ini, pemerintah ambil bagian menatapkan awal dan akhir bulan puasa. Para pejabat pemerintah, bagi yang muslim, menjalankan ibadah puasa. Bahkan, dalam kegiatan buka bersama misalnya, pejabat yang non muslim pun datang, tatkala diundang.

Selain itu, di berbagai daerah, kita lihat kantor-kantor pemerintah dan swasta, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, selalu dibangun masjid. Dengan begitu maka, orang tidak akan kesulitan menjalankan shalat pada setiap waktu. Bahkan, di tempat-tempat umum lainnya, di setiap bandara udara, terminal, stasiun kereta api, dan tempat penjualan bahan bakar, mushola dan lain sebagainya.

Dalam pemerintahan juga terdapat sebuah kementerian, yang khusus bertugas memberikan pelayanan terhadap kehidupan keagamaan, yaitu kementerian agama. Kementerian agama ini di antara tugasnya adalah memberikan pelayanan dan peningkatan kehidupan keagamaan. Sehubungan dengan peran tersebut, pemerintah menyediakan anggaran yang tidak kecil untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan keagamaan, baik di sekolah umum maupun di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Membaca gambaran tersebut, maka sesungguhnya kehidupan keagamaan di negeri ini sudah sedemikian kokoh. Kehidupan keagamaan ditopang dan bahkan difasilitasi oleh pemerintah hingga sedemikian besarnya. Belum lagi, pada hari-hari penting yang harus diperingati,

misalnya Isra' mi'raj, nuzul al Qur'an, hari kelahiran Nabi Muhammad saw., selalu diperingati oleh pemerintah di istana negara. Demikian pula kegiatan serupa juga diselenggarakan di kantor-kantor pemerintah pada level berikutnya, seperti di kantor Gubernur, kantor kabupaten atau kota, hingga di kantor desa.

Memang perlu diakui, masih saja ada kekurangan. Akan tetapi, sebenarnya campur tangan pemerintah terhadap kehidupan keagamaan sebagaimana digambarkan di muka sudah sedemikian besar. Semestinya para tokoh agama yang bersangkutan, memberikan dukungan lebih terhadap upaya pemerintah itu.

Faktor-faktor pemahaman beragama dikalangan masyarakat Indonesia diantaranya adalah: Rendahnya sikap toleransi, Faktor kepentingan politik, dan Sikap fanatisme.

Rendahnya Sikap Toleransi: Salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan (lazy tolerance) sebagaimana diungkapkan P. Knitter. Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola pertemuan tak langsung (indirect encounter) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah pertemuan tak langsung, bukan pertemuan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan diantara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik.

Faktor Kepentingan Politik: Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia, jika bukan yang paling penting diantara faktor-faktor lainnya. Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama dan bahkan memporak-porandakannya seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan “bangunan dialog” yang sedang kita selesaikan. Seperti yang sedang terjadi di negeri kita saat ini, kita tidak hanya menangis melihat political upheavels di negeri ini, tetapi lebih dari itu yang mengalir bukan lagi air mata, tetapi darah; darah saudara-saudara kita, yang mudah-mudahan diterima di sisi-Nya. Tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib teratur dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara, tetapi dengan alasan politik juga kita seringkali menunggangi agama dan memanfaatkannya.

Sikap Fanatisme : Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Jika orang ingin selamat, ia harus memeluk Islam. Segala perbuatan orang-orang non-Muslim, menurut perspektif aliran ini, tidak dapat diterima di sisi Allah.

Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu, Islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan. Tentu saja, dalam agama Kristen juga ada kelompok eksklusif seperti ini. Kelompok Evangelis, misalnya, berpendapat bahwa tujuan utama gereja adalah mengajak mereka yang **percaya untuk meningkatkan keimanan dan mereka yang berada "di luar" untuk masuk dan bergabung.** Bagi kelompok ini, hanya mereka yang bergabung dengan gereja yang akan dianugerahi keselamatan abadi. Dengan saling mengandalkan pandangan-pandangan setiap sekte dalam agama tersebut, maka timbullah sikap *fanatisme* yang berlebihan

Tidak banyak dikemukakan oleh para sarjana tentang mahasiswa serta peranannya, namun demikian kita belum mendapatkan satu kata bulat tentang apa dan bagaimana mahasiswa itu sebenarnya, suatu sosok mahasiswa sering diidentifikasi dengan idealisme, intelektualisme dan realitis, namun demikian tidak sedikit mahasiswa yang tidak memiliki hal tersebut.

Seorang mahasiswa menggali ilmu pengetahuan diperguruan tinggi tidak akan dapat manfaat sama sekali manakala mahasiswa tersebut tidak bermanfaat bagi orang lain.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia dengan ringkas menjelaskan bahwa yang dimaksud mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi

(1990:613)

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mahasiswa adalah seseorang yang sedang belajar pada perguruan tinggi yang merupakan calon sarjana penerus pembangunan, sebagai seseorang intelektual muda yang dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan sebagainya.

Tabel 1. Berikut ini table jumlah mahasiswa dengan berbagai macam agama yang dianut mahasiswa PPKn Angkatan 2009

No	Agama	Jumlah Mahasiswa
1	Islam	87
2	Kristen	4
3	Hindu	1
4	Budha	-
Jumlah		92

Sumber. Data Primer

Pada mahasiswa Program Studi PPKN Angkatan 2009 Pemahaman beragama merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki dalam menjalankan hidup, karena agama sebagai pengendali atas segala perbuatan yang akan dilakukan baik sekarang maupun yang akan datang.

Pada mahasiswa program studi PPKn yang berjumlah 92 orang maka peneliti mengadakan pra penelitian tentang konsep pemahaman beragama pada 40 mahasiswa dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pengamatan pada mahasiswa program studi PPKn angkatan 2009

No	Aspek yang diamati	Ukuran		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	Saling terbuka, saling pengertian dan saling menghargai dengan teman yang berbeda agama	8 orang	28 orang	4 orang
2	Sikap fanatisme terhadap agama yang dianutnya	23 orang	10 orang	7 orang
3	Netral terhadap isu-isu keagamaan	6 orang	9 orang	25 orang
4	Memahami agamanya	11 orang	10 orang	19 orang
5	Menerima perbedaan agama	12 orang	20 orang	5 orang

Sumber: Data Pengamatan pada mahasiswa PPKn angkatan 2009

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada mahasiswa program studi PPKn mayoritas masih belum memahami hakikat pemahaman beragama terhadap sikap toleransi sesama mahasiswa baik yang seagama maupun dengan teman yang berbeda agama.

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Beragama Terhadap Pembentukan Sikap

Toleransi Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Angkatan 2009, FKIP Universitas Lampung Tahun Akademik 2010/2011

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Beragama Berpengaruh Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Angkatan 2009, Pendidikan IPS FKIP, Universitas Lampung
2. Lingkungan kampus belum mewujudkan pembentukan sikap Toleransi secara maksimal/optimal
3. Pembinaan sikap bermasyarakat dalam mempengaruhi sikap seseorang dalam beragama

C. Pembatasan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah Pengaruh Pemahaman Beragama Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Angkatan 2009, Pendidikan IPS FKIP, Universitas Lampung

D. Perumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Pemahaman Beragama Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Angkatan 2009, Pendidikan IPS FKIP, Universitas Lampung

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengaruh Pemahaman Beragama Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Angkatan 2009, Pendidikan IPS FKIP, Universitas Lampung

2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan pada kajian pendidikan kewarganegaraan tentang penerapan nilai Agama dan sikap Toleransi pada diri mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa
2. Secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Universitas Lampung agar dapat menumbuh kembangkan sikap toleransi terhadap semua warga kampus
3. Sebagai calon guru, hasil penelitian ini untuk dijadikan suplemen materi pokok tentang masalah semangat kebangsaan, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas X

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang mengkaji Nilai Moral Pancasila, yang dibahas dalam mata

kuliah pendidikan generasi muda dan *Juvenile Delinquency* dan mata kuliah Kehidupan Keagamaan Indonesia.

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup Objek penelitian ini adalah Pemahaman Beragama Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Pada Mahasiswa Program Studi PPKN Angkatan 2009, Universitas Lampung.

3. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah mahasiswa FKIP program studi PPKn angkatan 2009, Universitas Lampung.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang langsung dimandatkan kepada ketua program studi PPKn, FKIP Universitas Lampung pada tanggal 10 November sampai selesainya penelitian ini

